



The Influence Of Local Taxes, Local Levies, And The Results Of Separated Local Assets Management On Regency/City Original Revenue In North Sumatra Province 2020-2024

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Muhammad Rafli ¹⁾, Tengku Eka Susilawaty ²⁾, Puja Rizqy Ramadhan ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: ¹⁾ mr4334804@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]
Revised [27 April 2026]
Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Regional Taxes, Regional Retributions, Separated Management of Regional Wealth.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Studi berikut tujuannya guna menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Populasi penelitian mencakup seluruh 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan total 165 laporan realisasi anggaran, menggunakan teknik sampling jenuh. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran melalui situs resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Pajak Daerah menjadi kontributor terbesar, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta pajak hotel dan restoran. Retribusi Daerah memberikan kontribusi melalui pembayaran atas jasa dan perizinan tertentu. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, seperti BUMD dan aset strategis daerah, berkontribusi melalui dividen, sewa aset, dan laba usaha. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 86,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi PAD dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi sumber PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Regional Taxes, Regional Levies, and the Results of Separated Regional Asset Management on Regional Original Revenue (PAD) in Regencies/Cities in North Sumatra Province for the period 2020–2024. The study uses a quantitative associative approach with a multiple linear regression method. The study population covers all 33 Regencies/Cities in North Sumatra with a total of 165 budget realization reports, using a saturated sampling technique. The data used are secondary data obtained from budget realization reports through the official government website. The results of the study indicate that partially Regional Taxes, Regional Levies, and the Results of Separated Regional Asset Management have a positive and significant effect on PAD. Regional Taxes are the largest contributors, especially from Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Ownership Transfer Fee, Motor Vehicle Fuel Tax, and hotel and restaurant taxes. Regional Levies contribute through payments for certain services and permits. Meanwhile, the Results of Separated Regional Asset Management, such as Regionally-Owned Enterprises (BUMD) and regional strategic assets, contribute through dividends, asset rentals, and operating profits. Simultaneously, these three variables significantly influenced PAD, with a coefficient of determination (R^2) of 86.3%. This indicates that most of the variation in PAD can be explained by these three variables. This study emphasizes the importance of optimizing PAD sources to increase fiscal independence and support sustainable regional development.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem negara kesatuan berbentuk Republik, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, di mana setiap daerah memiliki kewenangan otonomi untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pada tingkat kabupaten dan kota, diwujudkan melalui kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah, termasuk pengelolaan keuangan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik (Sitepu, 2023; Siregar, 2021). Salah satu indikator penting dalam pelaksanaan otonomi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah (Ristiyana, 2021). PAD berfungsi sebagai

sumber pembiayaan pembangunan daerah serta sebagai alat ukur kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya sendiri. Fenomena di Sumatera Utara menunjukkan bahwa nilai PAD di beberapa kabupaten/kota bersifat fluktuatif, dengan Kabupaten Toba Samosir mencatat PAD terendah pada tahun 2020 sebesar 57,40 miliar rupiah atau 94,88% dari anggaran (Sitepu, 2023). Rendahnya PAD disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak, kelemahan sistem administrasi, keterbatasan potensi daerah yang tergali, dan kualitas SDM aparatur yang rendah. Komponen utama PAD adalah pajak daerah, yaitu kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung (Naibaho et al., 2021). Pajak daerah berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian fiskal, namun tingkat pajak yang tinggi dapat menghambat investasi dan memberatkan masyarakat. Di Sumatera Utara, pajak daerah paling rendah tercatat pada Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 dengan realisasi 19,68 miliar rupiah atau 54,79% dari anggaran. Faktor penyebab rendahnya pajak daerah meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pajak, serta pengaruh kondisi ekonomi eksternal seperti inflasi dan nilai tukar (Hafandi & Romandhon, 2020; Naibaho et al., 2021). Penelitian terkait pengaruh pajak daerah positif terhadap PAD menunjukkan hasil yang berbeda; Zulfiana (2024) menyatakan pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD, sementara Manalu et al. (2023) menemukan pengaruh yang tidak signifikan. Selain pajak, retribusi daerah juga menjadi sumber PAD. Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan (Naibaho et al., 2021). Retribusi daerah mendukung pembiayaan otonomi daerah, namun nilainya juga berfluktuasi. Pada tahun 2020, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki retribusi terendah dengan realisasi 1,61 miliar rupiah atau 15,39% dari anggaran. Rendahnya nilai retribusi dapat disebabkan ketidaktepatan estimasi, keterbatasan anggaran, dan kemampuan pemungutan yang rendah (Latifatus Sirry, 2020). Seperti halnya pajak, penelitian mengenai pengaruh retribusi terhadap PAD menunjukkan hasil berbeda; Latifatus Sirry (2020) menemukan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan Manalu et al. (2023) menyatakan tidak berpengaruh. Komponen PAD lainnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan dari laba perusahaan milik daerah atau kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk deviden dan penyertaan modal (UU No. 23 Tahun 2014). Hasil pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD tambahan untuk mendukung otonomi daerah. Di Kota Binjai, nilai hasil pengelolaan kekayaan daerah terendah pada tahun 2020 tercatat sebesar 3,51 miliar rupiah atau 83,31% dari anggaran. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pandemi COVID-19 (Hafandi & Romandhon, 2020). Penelitian mengenai pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD juga menunjukkan hasil yang berbeda; Hafandi & Romandhon (2020) menemukan pengaruh positif, sedangkan Yusuf & Romandhon (2020) menyatakan tidak berpengaruh. Dengan demikian, rendahnya PAD pada beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara terutama dipengaruhi oleh rendahnya pajak dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan yang belum optimal. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan dana untuk pembangunan daerah, menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Sitepu, 2023; Hafandi & Romandhon, 2020; Naibaho et al., 2021).

LANDASAN TEORI

Teori Kontribusi

Kontribusi berasal dari kata Inggris *contribute* atau *contribution*, yang berarti keikutsertaan, keterlibatan, atau sumbangan, baik berupa materi maupun tindakan. Kontribusi materi dapat berupa bantuan finansial atau sumber daya, sedangkan kontribusi tindakan mencakup perilaku yang berdampak positif atau negatif bagi orang lain. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang, seperti pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, dan finansial (Faruk, 2023; Soerjono & Djoenaesih, 1997; Muliansyah, 2024).

Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD), teori kontribusi menekankan pentingnya peran daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, termasuk pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan, untuk meningkatkan pendapatan sendiri. Kontribusi ini juga mendorong efisiensi, efektivitas, dan spesialisasi dalam pengelolaan sumber daya demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan ini mencerminkan kemampuan dan kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, serta merupakan indikator nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah



melalui pembayaran pajak dan retribusi. Darmadi (2021) menekankan bahwa PAD tidak hanya menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah, tetapi juga menggambarkan kemandirian fiskal dan peran pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal.

Lebih lanjut, indikator PAD terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu total pajak daerah, total retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lain yang sah. Komponen-komponen ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan kata lain, semakin besar kontribusi dari komponen-komponen PAD ini, semakin tinggi pula kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan di wilayah masing-masing. Pajak ini dipungut dari seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) dan bersifat wajib serta memaksa, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Dengan demikian, pajak daerah menjadi salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap kesejahteraan dan pembangunan daerah, yang tujuan utamanya adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2009; Naibaho et al., 2021).

Pajak daerah memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Fungsi utamanya meliputi fungsi anggaran, yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin seperti belanja pegawai, pemeliharaan, dan pembangunan; fungsi mengatur, di mana pajak menjadi alat pemerintah untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi; fungsi stabilitas, yang memungkinkan pemerintah menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi; serta fungsi redistribusi, dengan menyalurkan pendapatan pajak untuk kepentingan umum dan pembangunan, termasuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima secara langsung atau izin yang diberikan. Berbeda dengan pajak yang dipungut tanpa terkait pelayanan langsung, retribusi hanya dikenakan jika pemerintah daerah menyediakan layanan atau memberikan izin tertentu. Penerimaan dari retribusi menjadi salah satu sumber pendapatan yang andal bagi daerah, karena besarnya dapat meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional (Nababan, 2020).

Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis utama. Pertama, retribusi jasa umum, yaitu pembayaran atas layanan yang disediakan pemerintah untuk kepentingan publik, misalnya pelayanan kesehatan, persampahan, KTP, pemakaman, parkir, pasar, pengujian kendaraan, dan pendidikan. Kedua, retribusi jasa usaha, yakni layanan yang bersifat komersial dan dapat juga disediakan oleh swasta, seperti penggunaan kekayaan daerah, pasar grosir, terminal, tempat penginapan, pelabuhan, dan rekreasi. Ketiga, retribusi perizinan tertentu, yang diberikan sebagai izin khusus untuk mendukung pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan atau penggunaan sumber daya, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, dan izin trayek.

Indikator keberhasilan retribusi daerah dapat diukur melalui realisasi penerimaan retribusi berdasarkan laporan realisasi anggaran (Hardy, 2020), yang menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam memungut retribusi dan memanfaatkan hasilnya untuk layanan publik dan pembangunan wilayah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD merupakan perusahaan yang mayoritas atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan mengelola aset secara profesional, sementara pemerintah tetap berperan sebagai pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berasal dari laba penyertaan modal pada BUMD, perusahaan milik negara (BUMN), maupun perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat. Pengelolaan ini tidak hanya memberikan manfaat finansial langsung bagi daerah, tetapi juga mendorong kemitraan strategis untuk pengembangan ekonomi lokal.

Indikator keberhasilan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diukur melalui realisasi hasil pengelolaan berdasarkan laporan realisasi anggaran. Semakin tinggi realisasi laba, semakin menunjukkan pengelolaan aset daerah dilakukan secara efisien dan profesional, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat (Alisman et al., 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Natasha & Andri (2021) Dalam penelitian di Kabupaten Semarang (tahun 2016-2019) ditemukan bahwa HPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti, Melani (2025) Penelitian pada wilayah Gerbangkertosusila (periode 2019-2023) juga menemukan bahwa HPKD secara positif dan signifikan mempengaruhi PAD

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2020–2024. Data yang digunakan berupa data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan (<https://dipk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>). Populasi penelitian mencakup seluruh 33 Kabupaten/Kota dengan total 165 laporan realisasi anggaran, yang dijadikan sampel menggunakan teknik sampling jenuh (sensus).

Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen, yaitu PAD, dan variabel independen meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan variabel bebas terhadap PAD, dengan pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 23. Sebelum uji regresi, dilakukan uji asumsi klasik, termasuk uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, untuk memastikan data memenuhi syarat analisis. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas menjelaskan variasi PAD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif sebelum dilakukannya transformasi dalam penelitian ini menggunakan SPSS 23.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Statistic Deskriptif Sebelum Data Di Transformasi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAJAK DAERAH	165	21.63	28.54	24.2032	1.30097
RETRIBUSI DAERAH	165	17.30	25.77	22.3496	1.39980
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	165	.00	25.30	21.9382	3.98672
PENDAPATAN ASLI DAERAH	165	23.22	28.68	25.2588	.97694
Valid N (listwise)	165				

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Sesuai tabel 1 di atas Variabel Pendapatan Asli Daerah banyaknya nilai 165, nilai minimum sebesar 23.22, nilai maximum sebesar 28.68, nilai mean sebesar 25.25, nilai standard deviation sebesar 0.97, nilai Pajak Daerah dengan banyaknya data 165 data dengan nilai minimum 21.63 dengan nilai maximum 28.54 dan nilai rata rata 24.20 dan nilai standard deviation 1.30, dan nilai Retribusi Daerah banyaknya nilai 165 data dengan nilai minimum 17.30 dengan nilai maximum 25.77 dan nilai mean 22.34 dengan nilai standard deviation 1.39, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan banyaknya nilai 165 data dengan nilai minimum 00 dengan nilai maximum 25.30 dan nilai mean 21.9 dengan nilai standard deviation 3.98 Setelah dilakukannya pengujian normalitas didapati bahwa data tidak normal sehingga dilakukan pernormalan data menguunkan transformasi data sehingga nilai statistik deskriptifnya juga berubah, oleh karenanya berikut hasil uji statistik deksriptif setelah dilakukannya transformasi data :



Tabel 2 Statistic Deskriptif Sesudah Data Di Transformasi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAJAK DAERAH	165	21.63	28.54	24.2032	1.30097
RETRIBUSI DAERAH	165	17.30	25.77	22.3496	1.39980
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	165	.00	25.30	21.9382	3.98672
TRANSFORM_Y	165	4.82	5.36	5.0249	.09641
Valid N (listwise)	165				

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 2 di atas Variabel Pendapatan Asli Daerah banyaknya nilai 165, nilai minimum sebesar 4.82, nilai maximum sebesar 5.36, nilai mean sebesar 5.02, nilai standard deviation sebesar 0.96, nilai Pajak Daerah dengan banyaknya data 165 data dengan nilai minimum 21.63 dengan nilai maximum 28.54 dan nilai rata rata 24.20 dan nilai standard deviation 1.30, dan nilai Retribusi Daerah banyaknya nilai 165 data dengan nilai minimum 17.30 dengan nilai maximum 25.77 dan nilai mean 22.34 dengan nilai standard deviation 1.39, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan banyaknya nilai 165 data dengan nilai minimum 00 dengan nilai maximum 25.30 dan nilai mean 21.9 dengan nilai standard deviation 3.98.

Uji Normalitas

Menurut Hafni Sahir (2021): pengujian normalitas ialah satu diantara dari berbagai uji asumsi klasik yang wajib dipenuhi pada analisis regresi linier berganda, terutama untuk memastikan bahwasanya data yang dipakai bersumber dari populasi yang terdistribusi secara normal, sehingga hasil analisis statistik menjadi valid. Normalitas data juga memengaruhi validitas uji hipotesis, seperti uji-F dan uji-t, sehingga hasil analisis statistik dapat diinterpretasikan dengan tepat. Dengan kata lain, apabila data tidak memenuhi asumsi normalitas, maka hasil regresi bisa menjadi menyesatkan, mengurangi akurasi prediksi, dan memengaruhi kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, uji normalitas tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi juga langkah penting untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas analisis regresi linier berganda. Uji dijalankan memakai Residual Plots dan uji KS (Kolmogorov-Smirnov) dengan bobot probabilitas 0,05. Hasilnya meliputi:

Tabel 3 Kolmogorov Smirnov Sebelum dilakukan transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		165
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.35965407
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.044
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.035 ^c

Penghitungan Kolmogorov-Smirnov diterapkan selanjutnya. Bilamana bobot sig asimtotik variabel data (2-ekor) melebihi 0,05, maka kesimpulannya memaparkan data mengikuti distribusi normal. Hasil penghitungan Kolmogorov-Smirnov yang dipakai oleh SPSS guna mengevaluasi normalitas seluruh variabel. Dari data yang ada, nampak bahwasanya bobot Kolmogorov-Smirnov ialah 0,035, yakni di bawah 0,05, memaparkan bahwasanya data tidak terdistribusi normal. Sehingga, dilakukanlah transformasi data, dan hasil sesudah transformasi meliputi:

**Tabel 4 Kolmogrov Smirnov Sesudah Dilakukan Transformasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

			Unstandardized Residual
N			165
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.03566539
Most Extreme Differences	Absolute		.068
	Positive		.068
	Negative		-.048
Test Statistic			.068
Asymp. Sig. (2-tailed)			.059 ^c

Perhitungan Kolmogorov-Smirnov lalu dijalankan. Bilamana bobot sig asimtotik untuk data variabel (2-ekor) melebihi 0,05, kesimpulannya memaparkan data tersebut distribusinya normal. Hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov yang diterapkan SPSS guna mengevaluasi normalitas seluruh variabel. Dari data tersebut, nampak bahwasanya bobot kolmogorov-Smirnov 0,59 melebihi 0,05, yang bermakna data mengikuti distribusi normal.

Uji Multikoleniaritas

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

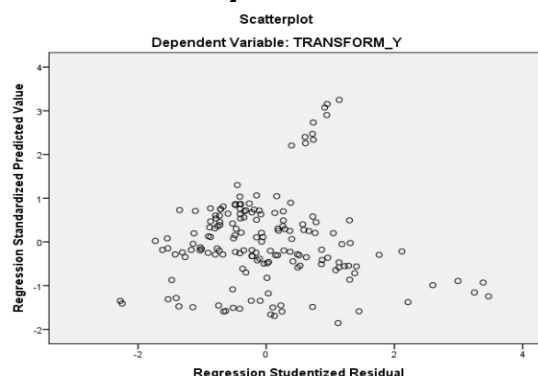
Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.304	.055		59.643	.000		
	PAJAK DAERAH	.058	.003	.785	21.408	.000	.632	1.582
	RETRIBUSI DAERAH	.009	.002	.137	3.789	.000	.647	1.546
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	.005	.001	.191	6.448	.000	.964	1.037

a. Dependent Variable: TRANSFORM_Y

Sumber : SPSS 23

Uji Heteroskedasitas

Gambar 1 Uji Heteroskedasitas



Pada diagram scatter-plot yang ditunjukkan, bisa dicermati bahwasanya titik-titik yang terbentuk tersebar secara random dan tidak mengikuti suatu pola. Selain itu, penyebaran titik-titik tersebut tetap ada di sekitar titik 0, sehingga uji berikut tidak memiliki permasalahan heteroskedastisitas.



Uji Autokolerasi

Tabel 6 Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.929 ^a	.863	.861	.03600	1.695

Bersumber uji yang dijalankan, bobot Durbin-Watson yang diperoleh dari pemodelan regresi mencapai 2,112. Bobot tersebut kemudian akan dibandingkan dengan bobot DU. Pada studi berikut, jumlah variabel independen (K) ialah 3 dan total data yang dipakai ialah 165 (n), menghasilkan bobot tabel DU senilai 1. 695. Dengan bobot tersebut, bisa dijalankan perbandingan antara DU (1. 695) dan DW (2. 112), yang memaparkan bahwasanya 1.695 kurang dari 2.112, dan 2.112 tidak lebih dari 4 dikurangi DU (4 - 1. 695 = 2. 305). Dari perbandingan bobot D-W ini, kesimpulannya memaparkan tidak ada autokorelasi pada pemodelan regresi.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.304	.055		59.643	.000
	PAJAK DAERAH	.058	.003	.785	21.408	.000
	RETRIBUSI DAERAH	.009	.002	.137	3.789	.000
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	.005	.001	.191	6.448	.000

a. Dependent Variable: TRANSFORM_Y

Sumber : SPSS 23

Uji T Parsial

Tabel 8 Uji T Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.304	.055		59.643	.000
	PAJAK DAERAH	.058	.003	.785	21.408	.000
	RETRIBUSI DAERAH	.009	.002	.137	3.789	.000
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	.005	.001	.191	6.448	.000

a. Dependent Variable: TRANSFORM_Y

Sumber : SPSS 23

Dari pemaparan tabel diatas menunjukkan hasil uji signifikan secara parsial dari setiap variabel penelitian dari data t-tabel dengan rumus (df= n-k-1 atau 165-3-1 = 161) adalah 1.65437. berikut penjelasan dari hasil diatas:

1. Melalui variabel independent X_1 (Pajak Daerah) didapati t-hitung 21.408, t-sig 0.000 hipotesis diterima bilamana t-hitung > t-tabel dan t-sig < 0.05. Melalui data, didapati t-hitung 21.408 > 1.654 dan t-sig 0.000 < 0.05. sehingga kesimpulan memaparkan Pajak Daerah secara individual berefek pada PAD yang bermakna H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Melalui variabel independent X_2 (Retribusi Daerah) didapati t-hitung 3.789, t-sig 0.000. hipotesis diterima bilamana t-hitung > t-tabel dan t-sig < 0.05. Data memaparkan t-hitung 3.789 > 1,654 dan t-sig 0.000 < 0.05. Sehingga kesimpulan memaparkan Retribusi Daerah secara individual efeknya signifikan positif pada PAD yang bermakna H_0 ditolak dan H_2 diterima.
3. Melalui variabel independent X_3 (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan) memperoleh t-hitung 6.448 t-sig 0.000. hipotesis diterima bilamana t-hitung > t-tabel dan t-sig < 0.05.

dari data yang didapat, t-hitung $6.448 > 1,654$ dan t-sig $0.000 < 0.05$. sehingga kesimpulannya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara individual efeknya signifikan positif pada PAD yang bermakna H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Uji F Simultan

Tabel 9 Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.316	3	.439	338.484	.000 ^b
	Residual	.209	161	.001		
	Total	1.524	164			

a. Dependent Variable: TRANSFORM_Y

b. Predictors: (Constant), HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH

Sumber : SPSS 23

Bersumber tabel, didapat F-hitung 338.484 dan t-sig 0.000. untuk bobot F-tabel ialah 2.66. Data memaparkan hasil f-hitung $338.484 > f$ -tabel 2.66 dan t-sig $0.000 < 0.05$ sehingga kesimpulannya memaparkan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan efeknya secara bersamaan signifikan pada PAD yang bermakna H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Uji Determinasi

Tabel 10 Uji Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.929 ^a	.863	.861	.03600	1.695

Tabel di atas memaparkan bahwasanya bobot koefisien determinasi (R^2) ialah 0. 863, yang bermakna 86.3%. Bobot R^2 yang semakin tinggi memaparkan bahwasanya model yang dipakai sangat efektif guna mengukur dampaknya, dengan syarat bobot tersebut berada antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Dari keadaan tersebut, kesimpulannya memaparkan bahwasanya variabel independent Retribusi Daerah, Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mampu menerangkan 86.3%, sedangkan 13.7% lainnya terpengaruh oleh variabel lainnya yang tidak termasuk pada studi berikut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaruh Parsial Positif
Retribusi Daerah, Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial efeknya positif dan signifikan pada PAD Provinsi Sumatera Utara.
2. Kontribusi Pajak Daerah
PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan), PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan), serta pajak hotel dan restoran menjadi kontributor utama peningkatan PAD.
3. Peran Retribusi Daerah
Retribusi dari jasa atau izin tertentu, seperti pasar, parkir, dan pelayanan kesehatan, memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
BUMD dan aset strategis menambah PAD melalui dividen, sewa aset, atau laba usaha, mendukung diversifikasi sumber pendapatan.
5. Pengaruh Simultan
Ketiga variabel secara bersamaan kontribusinya signifikan pada PAD dengan bobot R^2 senilai 86,3%, menunjukkan sebagian besar variasi PAD dijelaskan oleh ketiga sumber ini.



Saran

1. Optimalisasi Pajak Daerah
Tingkatkan pengawasan, inovasi, dan digitalisasi pembayaran untuk memaksimalkan kontribusi PAD.
2. Peningkatan Retribusi Daerah
Kembangkan jenis retribusi baru dan perbaiki kualitas layanan publik agar kepatuhan masyarakat meningkat.
3. Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Optimalkan pengelolaan BUMD dan aset strategis melalui pengelolaan produktif dan strategi bisnis efisien.
4. Sinergi Sumber Pendapatan
Kelola pajak, retribusi, dan kekayaan daerah secara terpadu agar kontribusi PAD lebih efektif.
5. Peningkatan Kemandirian Fiskal
Fokus pada strategi PAD untuk mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, Zaki Munandar, Zulfan Yusuf, Zahara, & Chairani, M. (2023). Pengaruh Laba Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(6), 2831–2841. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1735>
- Alexandro, R. (2020). Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 4(2), 118–125.
- Erlina, Wahyudi, A. A., & Nasution, I. (2023). Metodologi Penelitian. Medan. Yayasan Al-Hayat.
- Erni, Wulandari, D.S. & Selfiani (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Dki Jakarta, Vol 1. No. 1. <https://eksishum.untara.ac.id>
- Hardy Wiguna Nababan .(2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan. Skripsi.Universitas Medan Area.
- Herjanti, S., & Teg Teg, I. W. (2020). Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 37–48. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.289>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Jumiati .(2021). Kontribusi Umkm Pengolahan Kelapa Dalam Peningkatan Ekonomi Karyawan Di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Khamilah, O. (2020). [Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara](#). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, Volume 1, Nomor 10, 88-100.
- Khamilah, O. (2020). [Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal \(Studi Kasus 10 Pemerintahan Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara\)](#). *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, Hal 10, 1-13.
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 32–37. <http://e-journal.stie-aub.ac.id>
- Kemenkeu DJPK. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316. Pada tanggal 10 Oktober 2025
- Lafera, D. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanah Datar. *Journal of Social and Economics Research*, 2(1), 52–60. <http://idm.or.id/JSER>
- Manalu, S. P. R., Prayogi, O., & Lubis, H. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2021. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 173–191. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.868>

- Naibaho, F., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. (2021). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Effectiveness and Contribution of Hotel Tax on Local Revenue (Pad). *105 Jurnal EMBA*, 9(3), 105–112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/34600>
- Nababan, B. O. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor 2010-2016. *Jurnal Riset Mahasiswa Dewantara*, 2(1), 25-36.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah
- Ristiyan, A. H. (2021). *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020*. 1–77.
- Sri Mulyani, H., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>
- Sugiyono. (2020). *Olah Data Statistik Dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Mediakom
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 9(4), 1338.
- Wahyuni, R. A. P., & Arief, K. (2020). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Indonesia Accounting Rescarch Journal*, 1(1), 98–107.
- Yusuf Hafandi & Romandhon Romandhon. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo, [*Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology* Vol 3 No 2](https://doi.org/10.32500/Jematech.V3i2.1337). <https://doi.org/10.32500/Jematech.V3i2.1337>
- Zukhri, N., Aqdas, A., & Yanuar, D. (2021). Kinerja Keuangan Kabupaten Belitung Timur: Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33019/equity.v9i1.63>
- Zulfiana .(2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022. Skripsi. Universitas Nusantara PGRI Kediri.